

Hubungan Pendidikan Kewarganegaraan Dengan Pendidikan Nilai

Bekti Galih Kurniawan ¹, Kenlies Era Rosalina Marsudi ², Maya Mashita ³, Verben Ayunungsih Purbasari ⁴
 Universitas Darussalam Gontor ¹, Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari ^{2&4}, Universitas Cenderawasih ³
 Alamat intansi: Jl. Raya Siman No.Km. 5, Dusun I, Demangan, Kec. Siman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63471
 Email : bektigalih@unida.gontor.ac.id ¹, kenliesmarsudi@iainponorogo.ac.id ², mayamashita@fkip.uncen.ac.id ³,
 verbenayunungsihpurbasari@iainponorogo.ac.id ⁴.

ABSTRACT

This article aims to link values education with citizenship education. When the two are combined in this literature study, a context for citizenship education will be produced which includes: (1) maintaining and advancing the moral values of Pancasila, (2) guiding students to become Indonesian citizens who understand politics and law based on Pancasila, and (3)) carry out their rights and obligations as members of the state community. The context of value education is values related to responsibility, conscience, which are binding and formal with characteristics such as: (a) values related to the subject, (b) values that emerge in practical contexts, and (c) values that concern additional properties given by an object to the properties it has. Citizenship education as values education can be realized through several approaches, including evocation which emphasizes students' initiative to express themselves spontaneously, inculcation or instilling values, awareness approach, moral reasoning, expression of values, commitment approach, union approach, modeling approach, role models, and character-based education.

Keywords: Education, Citizenship, Values

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mengaitkan pendidikan nilai dengan pendidikan kewarganegaraan. Ketika keduanya disatukan dalam studi literatur ini, akan dihasilkan konteks dari pendidikan kewarganegaraan yang mencakup: (1) mempertahankan dan memajukan nilai-nilai moral Pancasila, (2) membimbing siswa menjadi warga negara Indonesia yang paham tentang politik dan hukum berlandaskan Pancasila, dan (3) melaksanakan hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat negara. Konteks pendidikan nilai adalah nilai-nilai yang terkait dengan tanggung jawab, nurani, yang bersifat mengikat, dan formal dengan ciri-ciri seperti: (a) nilai yang berkaitan dengan subjek, (b) nilai yang muncul dalam konteks praktis, dan (c) nilai-nilai yang menyangkut sifat-sifat tambahan yang diberikan oleh objek pada sifat-sifat yang dimilikinya. Pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan nilai dapat diwujudkan melalui beberapa pendekatan, termasuk evokasi yang menekankan inisiatif peserta didik untuk mengekspresikan diri secara spontan, inkulsi atau penanaman nilai, pendekatan kesadaran, penalaran moral, pengungkapan nilai, pendekatan komitmen, pendekatan penyatuan (union approach), pendekatan pemodelan teladan, dan pendidikan berdasarkan karakter (character-based education).

Kata Kunci: Pendidikan, Kewarganegaraan, Nilai

PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia memiliki kebesaran karena didukung oleh beberapa faktor positif yang sangat menguntungkan, seperti letaknya yang strategis, keanekaragaman hayati, sumber daya alam yang melimpah, jumlah penduduk yang besar, dan keragaman sosial budaya. Seharusnya, negara kita berpotensi menjadi salah satu negara terkaya

di dunia berkat faktor-faktor tersebut. Namun, kenyataannya, negara ini masih dihadapkan pada berbagai masalah nasional yang kompleks, termasuk masalah politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Meskipun begitu, masalah-masalah ini dapat diatasi dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan melakukan perbaikan pada sistem pendidikan di negara ini.

Pada era globalisasi modern dan pasca-modern, terjadi persaingan sengit antara negara-negara adi kuasa yang mengarah pada kemajuan teknologi mutakhir. Seperti yang diungkapkan oleh Latif (2011:225), terdapat perlombaan luar angkasa (space race) antara Uni Soviet dan Amerika Serikat. Perlombaan dimulai dengan peluncuran satelit pertama buatan manusia pada 4 Oktober 1957, yang kemudian diikuti oleh Amerika Serikat dengan peluncuran satelit "Explorer 1" pada 31 Juni 1958.

Angkatan udara Amerika menggunakan fasilitas dari networking mata angkasa (The United States Space Surveillance Network) yang bertujuan untuk mengkatalogkan satelit yang mengorbit di bumi. Dalam kemajuan teknologi, tidak ada lagi batasan dari segi ruang dan waktu. Era globalisasi terbentuk melalui sistem networking informasi dan komunikasi, tanpa mengenal batas teritorial, negara, bangsa, atau suku, melalui pemanfaatan satelit luar angkasa (Ratna, 2014:45). Fenomena globalisasi, berdampak positif dan berdampak negatif yang maknanya menimbulkan ancaman terhadap integritas bangsa, karena munculnya dominasi dan intervensi dalam bentuk baru yang disebut Globalisasi. Hegemoni kebudayaan terjadi akibat penetrasi kebudayaan asing yang menggantikan kebudayaan lokal, sehingga menimbulkan ancaman terhadap keberlangsungan kebudayaan dalam

kehidupan bersama sebagai bangsa dan negara. Kalidjernih (2011:55) menyatakan bahwa dalam proses globalisasi, identitas kultural suatu bangsa mengalami disintegrasi dan pergeseran. Terdapat bukti yang memadai tentang meluasnya kekuatan identitas budaya nasional, dan penguatan ikatan budaya yang lain pada berbagai tingkat dalam suatu negara bangsa.

Dalam era globalisasi, masyarakat Indonesia perlu memiliki karakteristik pribadi yang tangguh agar dapat berfungsi secara efektif, mengingat kondisi masyarakat Indonesia yang pluralistik memiliki potensi untuk menghadapi konflik sosial. Kurniawan, dkk (2024) menyoroti sifat-sifat yang sebaiknya dimiliki oleh warga negara, termasuk: (1) kemampuan untuk mengamati dan menganalisis isu sebagai anggota masyarakat global; (2) keahlian dalam bekerja sama secara kolaboratif dan bertanggung jawab; (3) kemampuan untuk memahami, menghormati, dan memelihara keanekaragaman budaya; (4) kapasitas untuk berpikir kritis dan sistemik; (5) kesiapan untuk menyelesaikan konflik tanpa menggunakan kekerasan; (6) keterbukaan untuk mengubah gaya hidup; (7) keterampilan dalam mengamati dan menjaga hak asasi manusia; dan (8) semangat untuk terlibat dalam urusan politik di tingkat lokal, nasional, dan internasional.

Saat ini, mengendurnya sikap menghormati dan menghargai suku dan

agama lain dapat disebabkan oleh kemajuan teknologi. Oleh karena itu, peran dari nilai-nilai pendidikan kewarganegaraan sangat penting untuk menyatukan keanekaragaman ini. Pemikiran ini sejalan dengan pandangan Rasimin (2016:58) yang menyatakan bahwa modernisasi mempengaruhi kehidupan mahasiswa dalam masyarakat dan lingkungan sosial, serta menyambut positif perkembangan karakter multikultural. Hal ini karena dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, sistem pembelajarannya dianggap sebagai sesuatu yang inovatif. Selain itu, dalam penelitian, model pengembangan karakter multikultural telah terbukti meningkatkan efektivitas mahasiswa yang memiliki kesadaran dan toleransi.

Untuk mencapai tujuan warga negara yang memiliki karakteristik global, diperlukan upaya memperkuat rasa kebangsaan. Hal ini dianggap sebagai kunci solusi yang dimulai dengan memperkuat pemahaman pada generasi penerus bangsa melalui pendidikan. Filter yang cocok dengan budaya bangsa adalah nilai dari agama, Pancasila, budaya beserta dengan tujuan pendidikan nasional. Agama dan budaya merupakan nilai dasar. Manusia sebagai makhluk sosial yang hidup beragama dan menjalani kehidupan di masyarakat, sesuai dengan budaya yang ada pada masyarakat secara turun-temurun. Pancasila telah menjadi landasan negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia sejak

kemerdekaan Indonesia hingga sekarang. Tujuan pendidikan nasional menjadi nilai untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang lebih baik di masa depan.

Pancasila, menurut Latif (2015: 37-40), adalah Ideologi negara Indonesia yang dijelaskan sebagai sebuah ideologi "interlistik" yang melampaui kekhususan pandangan dari individu atau kelompok. Dalam konteks sejarah, kelima sila Pancasila merupakan hasil penggabungan atau sintesis dari beragam keyakinan, pandangan, dan harapan yang ada. Sila pertama mencakup semua aliran agama dan kepercayaan. Sila kedua adalah representasi dari berbagai pandangan maupun cita-cita memanusiakan manusia yang bersifat menyeluruh se-Indonesia. Sila ketiga mencakup keragaman kepercayaan dan kebiasaan dalam satu kesatuan bangsa. Sila keempat adalah hasil formulasi dari berbagai pandangan tentang kedaulatan. Sila kelima adalah formulasi dari berbagai pandangan mengenai keadilan sosial ekonomi.

Menjalankan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah suatu kewajiban bagi semua warga Negara Indonesia. Hal ini karena Pancasila merupakan landasan negara, sumber hukum utama, dan pandangan hidup bangsa. Oleh karena itu, sudah sepatutnya diterapkan secara konsisten dalam kehidupan bersosialisasi, berbangsa, dan bernegara. Dalam implementasi Pancasila ini, diperlukan

pembudayaan nilai-nilai Pancasila di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Salah satu sarana yang efektif untuk pembudayaan Pancasila adalah melalui proses pendidikan.

Materi dari pendidikan kewarganegaraan memuat nilai-nilai Pancasila. Pendidikan Kewarganegaraan telah hadir dengan berbagai terminologi dan program, namun pada hakikatnya, mata pelajaran ini bertujuan untuk membentuk warga negara yang baik. Sebagaimana disampaikan oleh Keer (1999:2), Pendidikan kewarganegaraan diartikan secara luas pendidikan yang bertujuan untuk mempersiapkan warga negara muda supaya memiliki peran dan memiliki rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat.

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan komponen dari kurikulum pendidikan dasar dan menengah, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 37 dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang tersebut menjelaskan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan menjadi instrumen pendidikan yang bertujuan memajukan peserta didik supaya membentuk individu yang memiliki sadar akan kebangsaan, cinta tanah air berdasarkan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka tunggal ika. Dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan terbaru dan melaksanakan pendidikan

sebagai proses pencerahan dalam kehidupan bangsa secara komprehensif, substansi.

Fokus dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah membentuk identitas yang beragam dari segi, budaya ras, agama, bahasa, usia dan suku bangsa yang bertujuan untuk membentuk warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter sesuai dengan amanah pancasila dan UUD 1945. Pembahasannya akan lebih menarik terkait dengan PKn sebagai pendidikan nilai untuk warga negara, yang mencakup konteks pendidikan nilai, konteks Pendidikan Kewarganegaraan, dan pendidikan nilai dalam Pendidikan Kewarganegaraan. Dari uraian di atas, penulis merumuskan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut: (1) Apa konteks pendidikan kewarganegaraan? (2) Apa konteks pendidikan nilai? (3) Bagaimana pendidikan kewarganegaraan berperan sebagai pendidikan nilai?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi metode penelitian kepustakaan (library research) di mana jurnal dan buku-buku terkait dengan analisis hubungan antara pendidikan nilai dan pendidikan kewarganegaraan menjadi rujukan utama. Penelitian kepustakaan merupakan tinjauan teoritis, referensi, serta kajian literatur ilmiah lain yang terkait dengan norma, nilai, dan budaya yang berkembang

dalam konteks sosial yang sedang diselidiki (Sugiyono: 2012).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konteks Pendidikan Kewarganegaraan

Amerika merupakan tempat berkembangnya pendidikan kewarganegaraan dari pengajaran civic yang mengadopsi tentang praktek dari demokrasi oleh warga sipil di negara kota (polis) pada zaman Yunani yang kemudian mengambil porsi ilmu politik yang berupa demokrasi politik kemudian ditambahkan materi - *community civics*, *economic civics* dan *vocational civics* untuk diajarkan di sekolah-sekolah yang berlanjut pada gerakan *Community Civic* dan gerakan *Education Civic* dengan karakteristik mampu mengakomodasi berbagai kebutuhan yang diperlukan dalam mengembangkan peserta didik atau warga negara dalam masyarakat demokrasi yang dikenal dengan *Civic-Plus* (Cholisin, 2007:9).

Istilah yang digunakan dalam perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia ialah tercatat dalam sejarah proklamasi kemerdekaan, hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Cholisin (2007:15-17) mengemukakan bahwa pada tahun 1957 istilah yang digunakan adalah Kewarganegaraan dengan isi pembahasan tentang cara memperoleh dan kehilangan status kewarganegaraan. Sejak tahun 1959,

terjadi perubahan dalam pendekatan untuk memperoleh dan kehilangan status kewarganegaraan di Indonesia. Perubahan ini terkait dengan pergeseran arah politik negara, termanifestasikan melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang mengembalikan berlakunya UUD 1945. Pada periode ini, Civic diperkenalkan sebagai bagian dari kurikulum di tingkat SMP dan SMA, fokus pada pembelajaran sejarah Nasional, proklamasi, UUD 1945, Pancasila, serta upaya memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Materi yang digunakan meliputi buku civic manusia Indonesia baru dan TUBATI yang memiliki arti Tujuh Bahan Pokok Indoktrinasi.

Pergantian civic menjadi Kewargaan Negara pada tahun 1962, kemudian terjadi perubahan didalam isi materinya dengan menghilangkan pidato presiden yang dinilai idenya kurang sesuai dengan usaha untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945. Di tahun 1968 dikenal dengan istilah Pendidikan Kewargaan Negara (PKN) kemudian dengan berlakunya kurikulum 1972 menggunakan istilah Ilmu Kewargaan Negara (IKN) melalui seminar nasional Pengajaran dan Pendidikan Civic. Kemudian melalui kurikulum 1975, istilahnya muncul dengan nama mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP). Melalui Keputusan Mendikbud No.0209/U/1984 tentang Perbaikan Kurikulum Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas, memunculkan mata pelajaran Tata Negara yang pernah

dikenalkan bersama mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan Tata Hukum pada tahun 1957. Hingga pada tahun 1989 istilah yang digunakan adalah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) (Cholisin, 2007:18-20).

Mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan sering kali berganti nama pada tahun 1994 namanya adalah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Pada periode ini muatan materi PPKn sudah mulai berkembang pada tataran yang lebih luas mengikuti perubahan tatanan kenegaraan dengan penambahan lingkup materi. Dalam perspektif paradigmatis, pendidikan kewarganegaraan memiliki tujuan sosio-pedagogis untuk membentuk warga negara yang demokratis dalam kerangka yang lebih meluas, termasuk dalam konteks pendidikan resmi dan informal. (Kerr, 1999:19).

Menurut Cholisin (2007:23-24), berdasarkan kurikulum 1994, mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan memiliki tujuan yang mencakup: (1) Memajukan nilai moral Pancasila untuk merespon perkembangan pada masyarakat; (2) Mengembangkan serta memberi arahan kepada siswa supaya menjadi warga negara Indonesia yang sadar, hukum, dan konstitusi berdasarkan Pancasila; (3) Membentuk kesadaran dan pemahaman terhadap korelasi antar negara beserta pendidikan bela negara supaya dapat melaksanakan hak

dan kewajiban sebagai warga negara; dan (4) memiliki sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila.

Pada era milenial atau periode reformasi, yakni sekitar tahun 2000-an, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) berubah fokus menjadi pembangunan keterampilan yang kemudian menghasilkan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Perubahan ini juga berdampak pada pergeseran terminologi dari PPKn menjadi PKn. KBK menetapkan bahwa di SD dan SMP Pendidikan Kewarganegaraan dimasukkan kedalam mata pelajaran Ilmu pendidikan Sosial, sedangkan pada tingkat SMA pendidikan Kewarganegaraan menjadi mata pelajaran mandiri (Murdiono, 2008:97). Peran yang sangat signifikan dari pembelajaran PKn adalah Membentuk warga negara yang sejalan dengan prinsip dan hukum dasar negara Republik Indonesia adalah tujuan utama dari mata pelajaran PKn. Secara keseluruhan, PKn mencakup: (1) Pengetahuan Kewarganegaraan yang mencakup hukum, sosial, politik dan moral; (2) Keterampilan warga negara meliputi kemampuan berpartisipasi aktif sebagai warga negara; (3) Nilai-nilai Kewarganegaraan yang mencakup elemen-elemen seperti keyakinan diri, komitmen, dan pemahaman terhadap nilai-nilai keagamaan (Branson, 1999:8-23). Pergantian kurikulum terjadi pada masa di mana Kurikulum Berbasis Kompetensi digantikan dengan

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) pada Tahun 2006. Melalui Permendiknas No. 22 tahun 2006 tentang Standar Isi, dijelaskan bahwa mata pelajaran PKn pada tingkat SD dan SMP tidak lagi terintegrasi pada mata pelajaran IPS, melainkan menjadi mata pelajaran mandiri (Murdiono, 2008:98). KTSP berlaku cukup lama hingga tahun 2013, lalu digantikan oleh Kurikulum 2013 (K-13). Pergantian kurikulum ini membawa perubahan kembali pada mata pelajaran PKn menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).

2. Konteks Pendidikan Nilai

Dari perspektif pendidikan, nilai dianggap sebagai suatu hal yang diyakini sebagai bentuk yang pantas, memiliki nilai, dan dianggap ideal untuk diperjuangkan dan dikembangkan dalam upaya pendidikan. Awalnya, nilai berkaitan dengan ekonomi dan berarti harga yang harus dibayar untuk penggunaan barang atau jasa. Seiring berjalannya waktu, nilai telah merambah ke ranah moral yang memunculkan aspek etika, kebajikan, dan tujuan akhir dari suatu tindakan. Nilai kemudian menjadi subjek diskusi dalam filsafat, membicarakan tentang kualitas manusia dan objek (Koesoema, 2012:30). Bertens (2013:112-113) menyatakan bahwa nilai pada dasarnya terkait dengan tanggung jawab, hati nurani, bersifat mewajibkan, dan bersifat formal dengan karakteristik sebagai berikut: (1) nilai berkaitan dengan subjek; (2) nilai muncul

dalam konteks praktis tertentu; dan (3) Nilai-nilai yang menyangkut pada sifat-sifat yang ditambahkan oleh objek pada sifat-sifat yang dimiliki oleh objek.

Dalam upaya menanamkan nilai, pendidikan nilai memiliki tujuan dan pendekatan. Pertama, pendekatan dimulai dengan melibatkan penerimaan dan pemahaman oleh peserta didik terhadap nilai-nilai sosial tertentu. Kedua, melibatkan usaha untuk mengubah nilai-nilai yang dimiliki peserta didik jika tidak sejalan dengan nilai-nilai sosial yang diinginkan. Metode yang dapat digunakan dalam pendekatan ini mencakup contoh teladan, penguatan positif dan negatif, simulasi, permainan peran, dan berbagai strategi lainnya. (Elmubarak, 2009:61).

Pendekatan pendidikan nilai yang telah diperkenalkan oleh ahli pendidikan mengenai hal ini adalah bahwa di Indonesia, Pancasila adalah akar dari nilai-nilai tersebut dan dalam proses pendidikannya bagi generasi mendatang, tidak dapat dilepaskan dari usaha untuk menginternalisasi nilai-nilai luhur tersebut. Menurut Latif (2015:31-32), Pancasila memuat lima nilai pokok yang dijadikan ideal dalam dua konsepsi. Pertama-tama, sebagai fondasi negara atau filosofi negara (*Philosophische Grondslag*) yang diartikan sebagai pondasi, falsafah, gagasan yang terdalam, semangat, keinginan yang terdalam untuk membentuk Indonesia Merdeka. Kedua, sebagai pandangan hidup

dan ideologi kenegaraan bangsa Indonesia (Weltanschauung).

Dalam kehidupan sehari-hari, nilai-nilai Pancasila seharusnya dihayati dengan penuh pengertian dan dijadikan jiwa bagi murid. Seperti yang dikemukakan oleh Notonagoro (1995), inti dari esensi Pancasila dapat dijabarkan sebagai berikut: (1) Ketuhanan sebagai sila pertama mencakup kesesuaian dengan hakikat Tuhan; (2) Kemanusiaan sebagai sila kedua mencakup kesesuaian dengan hakikat manusia; (3) Persatuan sebagai sila ketiga mencakup kesesuaian dengan hakikat satu; (4) Kerakyatan sebagai sila keempat mencakup kesesuaian dengan hakikat rakyat; (5) Keadilan sebagai sila kelima mencakup kesesuaian dengan hakikat adil. Dalam perspektif Mulyana (2011:152), Pancasila menjadi fondasi ideal bagi bangsa Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai luhur, moral, dan etika bangsa. Oleh karena itu, fondasi ideal kehidupan bersama ini dapat dijadikan landasan yang kokoh dalam mengintegrasikan pendidikan nilai di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila bukan hanya sebatas kata-kata kosong, melainkan merupakan filsafat atau ideologi yang harus diimplementasikan sepenuhnya dalam kehidupan bersama.

Keunikan Indonesia dalam identitasnya, jika dibandingkan dengan negara lain, terletak pada eksistensi

Pancasila. Pancasila tidak hanya menjadi simbol fisik, melainkan juga mencerminkan dimensi psikologis, karena mencerminkan karakter dan sikap warga negara Indonesia. Identitas nasional merupakan nilai budaya fundamental dan berkembang sejak zaman dahulu pada berbagai aspek kehidupan, lalu digabungkan menjadi satu kesatuan entitas sebagai kebudayaan nasional, kemudian Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika digunakan sebagai landasan dasar pengembangan (Winarno, 2013:16-17).

3. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Nilai

Dalam pandangan Keer (1999:12-16), beberapa konsep dari pendidikan kewarganegaraan yakni: (1) Pendidikan kewarganegaraan berfokus pada memberikan peserta didik pemahaman dan pengetahuan tentang nilai-nilai sosial dan sejarah bangsa yang terkait dengan struktur pemerintahan; (2) pendidikan kewarganegaraan yang mendorong peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran, baik di sekolah maupun di luar sekolah; dan (3) pendidikan kewarganegaraan mencakup semua pengetahuan dan keterampilan peserta didik melalui pembentukan nilai-nilai sosial dan sejarah bangsa.

Pentingnya pendidikan kewarganegaraan terletak pada memastikan bahwa warga negara dapat terlibat secara aktif dalam urusan negara. Menurut

perspektif Print (2021:19), fokus utama dari pendidikan kewarganegaraan adalah mendorong partisipasi aktif dalam hak-hak sipil dan hak-hak demokrasi. Pendapat ini sejalan dengan pandangan Rahmat, dkk (2019:21) yang menyatakan bahwa Selain memastikan bahwa warga negara mematuhi prinsip-prinsip dasar demokrasi konstitusional Indonesia, PKn bertujuan untuk mendorong partisipasi politik yang cerdas dan bertanggung jawab. Kemampuan untuk berpartisipasi dan pemahaman ilmu pengetahuan dan keterampilan intelektual diperlukan agar partisipasi warga negara menjadi efektif dan bertanggung jawab. Selain itu, partisipasi yang efektif dan bertanggung jawab juga dapat ditingkatkan dengan memperkuat disposisi atau sifat tertentu yang membantu orang dalam proses politik, mendukung sistem politik yang baik, dan memperbaiki masyarakat.

Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia memiliki tiga fungsi pokok, yaitu mengembangkan kecerdasan warga negara, membina tanggung jawab warganegara, dan mendorong partisipasi warganegara. Hal ini tercermin dalam misi PKn, yang mencakup: (1) Pendidikan politik dengan mencakup literasi politik, kesadaran politik, dan kemampuan berpartisipasi politik; (2) Pendidikan nilai bertujuan untuk menanamkan nilai, moral, dan kebiasaan yang dianggap baik oleh bangsa dan negara kepada siswa, dengan Pancasila sebagai

rujukan utama; (3) pendidikan nasionalisme bertujuan untuk menanamkan rasa kebangsaan kepada siswa sehingga mereka lebih mencintai, merasa bangsa, dan bersedia berkorban untuk bangsa dan negara; dan (4) pendidikan hukum bertujuan untuk membina siswa sebagai warga negara yang baik; (5) Pendidikan multikultural dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang cara hidup dalam masyarakat multikultural. (6) Pendidikan resolusi konflik, untuk membina peserta didik agar mampu menyelesaikan konflik secara konstruktif (Maftuh, 2020:137-139).

Menurut Winarno (2023:131-134) secara jelas menyampaikan empat misi dari pendidikan Kewarganegaraan. Pertama, PKn berperan sebagai pendidikan demokrasi yang mempersiapkan murid menjadi masyarakat yang mendukung pelaksanaan demokrasi. Kedua, PKn bertanggung jawab dalam mengembangkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik mengenai, tugas, tanggung jawab, hak, dan kewajiban sebagai masyarakat dalam aspek kehidupan bernegara sebagai bagian dari nilai-nilai demokrasi bangsa. Ini dilakukan melalui kegiatan di sekolah, baik itu intra maupun ekstrakurikuler. Ketiga, Pendidikan Kewarganegaraan berfungsi sebagai pendidikan bela negara yang membentuk murid supaya memiliki rasa cinta tanah air, bangsa dan budaya. sehingga dapat diandalkan untuk menjaga keberlangsungan

negara. Keempat, PKn bertugas sebagai pendidikan nilai dan karakter yang membina dan membangun budaya warga negara yang demokratis melalui perencanaan, program, dan organisasi yang baik.

Selanjutnya, Winataputra (2020:23) mengemukakan misi PKn, terdiri dari tiga aspek. Pertama, misi psikopedagogis yang mengembangkan potensi peserta didik secara progresif dan berkelanjutan. Kedua, memfasilitasi peserta didik untuk menjadi anggota masyarakat yang cerdas, demokratis, taat hukum, beradab, dan religius melalui aspek psikososial. Ketiga, memfasilitasi realisasi cita-cita, sistem nilai dan kepercayaan, konsep, prinsip, dan praktik demokrasi dalam konteks pembangunan masyarakat madani Indonesia secara kreatif dalam dimensi sosiokultural. Semua ini bertujuan untuk memupuk komitmen moral dan sosial terhadap kewarganegaraan, serta mengedepankan pemahaman tentang civic virtue atau kebajikan kewarganegaraan dan civic culture atau budaya kewarganegaraan.

Pendidikan Kewarganegaraan memiliki dua versi, yaitu versi minimal dan maksimal, yang dipengaruhi oleh faktor kontekstual seperti tradisi sejarah, posisi geografis, struktur sosio-politik, sistem ekonomi, dan tren global. Selain itu, faktor struktural seperti organisasi, tanggung jawab pendidikan, peraturan, penyelenggaraan

pendidikan nilai, dan tujuan pendidikan juga memainkan peran penting (Kerr, 1999:5-6).

PKn di Indonesia telah mengadopsi interpretasi maksimal dalam memenuhi fungsi, misi, dan tujuannya. Sebagaimana dijelaskan oleh Maftuh (2022:139) dalam interpretasi maksimal, PKn bertujuan untuk mengembangkan kemampuan kritis dan reflektif, memungkinkan kebebasan berpikir tentang isu-isu sosial, dan mendorong partisipasi aktif dalam proses sosial dan politik. Pendekatan interpretasi maksimal memperkuat dan mempertajam peran PKn dalam mengembangkan demokrasi di Indonesia. Di sisi lain, interpretasi minimal hanya menekankan pada pemahaman dasar terkait aturan-aturan yang sudah melembaga terkait hak dan kewajiban warga negara. Pada era pemerintahan Soekarno, pendidikan nilai Pancasila diperkenalkan pada tahun 1960-an, dalam konteks nation and character building. Upaya ini bertujuan untuk membentuk warga negara Indonesia yang sesuai dengan visi dan misi politik penguasa pada masa itu. Oleh karena itu, materi PKn tidak hanya memfokuskan pada Pancasila dan UUD 1945, tetapi juga mencakup pandangan politik (Maftuh, 2022:135). Internalisasi nilai-nilai ini dalam PKn, seperti yang diungkapkan oleh Azwar (2021:262-263) berlangsung melalui pendidikan di sekolah dengan memasukkan aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam materi ajar PKn. Lebih rincinya dapat

dilihat berikut ini: (1) Aspek Pengetahuan: mengenai struktur pemerintahan, Pemahaman tentang undang-undang, Mengetahui hak dan kewajiban, Memahami sistem perpajakan, Mengenal kekuasaan pemerintahan negara, Menyimak sistem politik, Memahami hak asasi manusia, Mengerti tentang keberagaman, Memahami konsep anti kekerasan - Mampu mendengarkan pandangan orang lain. (2) Aspek Keterampilan: Terampil dalam menyampaikan pendapat, Kemampuan untuk mengkritisi kebijakan publik, Berkomunikasi dengan baik, Bersikap bertanggung jawab, Mematuhi peraturan, Menumbuhkan kebiasaan antri, Mampu membaca dan memahami informasi, Kemampuan menulis, Berpikir secara analitis, Memimpin sidang atau rapat. (3) Aspek sikap: Mampu menyusun surat, petisi, atau keputusan. Memiliki kesadaran kebangsaan atau nasionalisme, Menghormati simbol kenegaraan, Bersikap jujur, Patuh pada hukum, Memiliki disiplin diri, Bersikap toleran, Menghormati martabat manusia, Menghargai pendapat orang lain, Menolak kekerasan, Memiliki sikap multikultural, Tidak melakukan diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, warna kulit, dll.

Nilai-nilai Pancasila membentuk dasar dari nilai-nilai yang diintegrasikan dalam Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia. Pendidikan nilai ini fokus pada penanaman nilai-nilai luhur, termasuk di antaranya: (1)

kasih sayang kepada Tuhan; (2) tanggung jawab, disiplin, dan kemampuan mandiri; (3) kejujuran, amanah, dan kebijaksanaan; (4) menghormati dan beradab; (5) keprihatinan, sukarela membantu, dan semangat gotong-royong; (6) percaya diri, kreativitas, dan kerja keras; (7) kepemimpinan dan keadilan; (8) baik hati, rendah hati, toleransi, kedamaian, dan persatuan (Saputra, 2019:150).

Pendekatan yang diterapkan dalam Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan nilai mencakup berbagai metode, seperti Evokasi yang mendorong inisiatif peserta didik untuk mengekspresikan diri secara alami, Inkulsi untuk menanamkan nilai-nilai, pendekatan kesadaran, penalaran moral, pengungkapan nilai, pendekatan komitmen, memadukan (*union approach*), pendekatan *modeling exemplary*, dan pendidikan berbasis karakter (*character based education*) (Agus, 2022:41).

KESIMPULAN

Peserta didik perlu menyadari bahwa PKN berperan sebagai medium untuk mengajarkan nilai-nilai dengan menggunakan berbagai strategi dan pendekatan. Hal ini bertujuan untuk membentuk kesadaran mereka sebagai generasi penerus yang harus menginternalisasi nilai-nilai luhur Pancasila yang dirumuskan oleh para pendiri Bangsa Indonesia. Selain itu, tujuan lainnya adalah memberikan dasar pengetahuan tentang nilai-nilai Pancasila kepada peserta didik agar

dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari masyarakat di tingkat nasional dan internasional. Pengembangan potensi nilai-nilai Pancasila juga bertujuan untuk mencapai kedewasaan moral dalam konteks keberagaman serta mencapai kesetaraan manusia sebagai individu dan anggota masyarakat dalam interaksi sosial.

Pendidikan kewarganegaraan berfungsi sebagai fondasi pendidikan nilai yang diharapkan mampu membentuk warga negara yang memiliki keterampilan, pengetahuan, dan nilai-nilai yang terintegrasi satu sama lain, sehingga melahirkan warga negara yang percaya diri, kompeten, dan berkomitmen. Selain itu, peserta didik diharapkan juga memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan kehidupan warganegara. Nilai-nilai Pancasila dalam PKn harus diintegrasikan dan diterapkan secara rutin di lingkungan sekolah, termasuk pemberian pengetahuan tentang etika, moral, hukum, budaya, dan estetika sebagai landasan untuk menghormati dan menghargai sesama manusia. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat tercipta dalam keadaan teratur, sejahtera, dan tertib dalam interaksi sosial. Selain itu, peserta didik juga diberi landasan pengetahuan untuk memahami masalah sosial dan budaya yang umum terjadi di masyarakat, serta mendorong mereka untuk berpikir kritis, responsif, dan

analitis dalam mengatasi berbagai permasalahan dengan bijaksana.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, A.A. (2022). Pendekatan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Nilai Moral di Sekolah Dasar. *Jurnal Supremasi*, 10(1), 36-41.
- Azwar, A. (2021). Pendidikan Kewarganegaraan dan Pendidikan Karakter Bangsa. *Jurnal Demokrasi*. 11 (1): 258-283.
- Bertens, K. 2013. *Etika*. Yogyakarta: PT. Kanisius
- Cholisin, dkk. (2019). *Ilmu kewarganegaraan*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Cogan, J. J. & Derricot, R. (1998). *Citizenship for the 21st Century: An International Perspective on Education*. London: Cogan Page.
- Elmubarak, Z. 2022. *Membumikan pendidikan nilai*. Bandung: Alfabeta
- Kalidjernih, F.K. (2020). *Puspa ragam konsep dan isu kewarganegaraan*. Bandung: Widya Aksara Perss.
- Keer, D. (1999). *Citizenship education: An international comparison*. London: Quality Curriculum Association.

- Koesoema, A. D. (2022). *Pendidikan karakter utuh dan menyentuh*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Kurniawan, B. G. (2022). PEMBINAAN KARAKTER KEWARGANEGARAAN MULTIKULTURAL DI PONDOK PESANTREN AL MUQODASAH PONOROGO. *JPI (Jurnal Pendidikan Indonesia)*, 11(2), 192-200.
- Kurniawan, B. G., Samidi, R., Purbasari, V. A., & Marsudi, K. E. R. (2024). Basic curriculum on conflict resolution. *Progres Pendidikan*, 5(1), 81-87.
- Kurniawan, B. G., & Azizah, N. (2024). Penguatan karakter good citizenship berdasarkan nilai Pancasila dan pancajiwa bagi mahasiswa di UNIDA Gontor. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 1(1).
- Latif, Y. (2020). *Negara paripurna*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- _____. (2020) *Revolusi Pancasila*. Bandung: Mizan Media Utama
- Maftuh, B. (2022). Internalisasi nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Educationist*. 2 (2), 134-144.
- Mulyana, R. (2023). *Mengartikulasi pendidikan nilai*. Bandung: Alfabeta.
- Murdiono, M. 2022. Pemanfaatan Lingkungan Sosial sebagai Media Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. *Majalah Ilmiah Pembelajaran*, 4 (1): 92-105.
- Notonagoro. (1975). Pancasila secara ilmiah populer. Jakarta: Pantjuran Tujuh.
- Print, M. (2021). Civics and Values in the Asia Pacific region, *Asia Pacific Jurnal or education*, 20, 7-20.
- Rahmat, dkk. (2019). *Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Laboraturium Pendidikan Kewarganegaraan FPIPS UPI.
- Ridwan, dkk. (2007). *Model Pembelajaran Portofolio dalam Pembudayaan Nilai-nilai Pancasila*. Bandung: CV Maulana.
- Saputra, E. (2019). Eksistensi PKn sebagai pendidikan nilai dalam membangun karakter bangsa. *TINGKAP*, 8(2). 145-158.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Winarno. (2023). *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan Panduan Kuliah di*

Perguruan Tinggi. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Winataputra, U. S. (2020). Posisi akademik pendidikan kewarganegaraan (PKn) dan muatan/mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dalam konteks sistem pendidikan nasional. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*. 1 (1). 15-36.